

STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor)

Nasdar Wijaya

Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

ABSTRAK

Salah satu cara untuk menyukkseskan pembangunan di desa adalah dengan meningkatkan pendapatan desa. Besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan oleh BUMDES dalam mengelola dan memaksimalkan aset-aset yang adadi desa. Karena menurut Undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Desain penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif historis. Variabel yang diteliti adalah strategi BUMDes dan peningkatan pendapatan asli desa. Teknik pengumpulan data menggunakan stdui dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Direktur BUMDes, serta masyarakat desa bojonggede. Tulisan ini mendiskripsikan strategi pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDES dalam meningkatkan pendapatan desa. Adapun strategi yang dilakukan oleh BUMDES bojonggede makmur, penyusunan strategi, pelaksanaan strategi. Strategi tersebut dilakukan oleh BUMDES Desa Bojonggede baik di bidang barang maupun jasa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan yang telah dilakukan oleh BUMDes bojonggede makmur tidak dapat berjalan dengan baik karena BUMDes bojonggede makmur tidak dapat meningkatkan pendapatan asli Desa bojonggede pada tahun 2019.

Kata kunci : strategi Badan usaha milik desa, pendapatan asli desa

ABSTRACT

One way to succeed in village development is to increase village income. The size of the village income is influenced by the strategy undertaken by BUMDES in managing and maximizing the assets in the village. The Village (BUMDES) is a business entity whose capital is wholly or most of the capital owned by the village through direct participation from village assets that are separated in order to manage assets, services, and other businesses for the greatest welfare of the village community. The research design uses historical qualitative research methods. The variables studied were the BUMDes strategy and the increase in village original income. Data collection techniques using study documentation, observation and interviews. Informants taken in this study were the Village Head, Director of BUMDes, and the village community of Bojonggede. This paper describes the management strategy carried out by BUMDES in increasing village income. The strategies carried out by the Bojonggede Prosperous BUMDES are strategy formulation, strategy implementation. The strategy was carried out by the BUMDES of Bojonggede Village both in the field of goods and services. From the results of the study, it can be concluded that the management strategy that has been carried out by the prosperous Bojonggede BUMDes cannot run well because the prosperous Bojonggede BUMDes cannot increase the original income of Bojonggede Village in 2019.

Keywords: village-owned enterprise strategy, village original income

1. PENDAHULUAN

Era otonomi saat ini, menjadi peluang besar bagi daerah untuk memajukan dan membangun daerahnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Era otonomi telah banyak mendukung daerah untuk lebih memperhatikan nilai-nilai yang berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya serta menciptakan kemandirian daerah guna meningkatkan pendapatan Asli Desa dan peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Otonomi yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Keuangan desa yang di dapatkan dari sumber pendapatan desa harus di kelolah baik demi terciptanya pembangunan desa. Namun, kita ketahui bahwa sumber pendapatan desa sebagian besar bersal dari bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena desa merupakan daerah otonomi yang kecil sehingga jika hanya mengandalkan pendapatan asli desa tidak akan mampu meningkatkan pembangunan desa, baik itu pembangunan dalam segi infrastruktur maupun di segi administratif. Sehingga perlu pengelolaan dan manajemen yang baik dalam pendapatan asli desa dan keuangan desa agar desa memiliki pendapatan asli desa yang memadai untuk menopang kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu strategi untuk memudahkan desa untuk sumber pendapatan desa adalah pemerintah membuat kebijakan yang mengatur hal tersebut. Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat. Dalam era otonomi juga perlu diberlakukan kebijakan yang memberikan akses dan memberikan kesempatan kepada desa untuk dapat menggali potensi baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang berada dalam wilayah desa tersebut yang nantinya digunakan sebagai sumber pendapatan desa.

Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes ini antara lain adalah UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, serta PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Sedangkan maksud dari pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksud untuk menampung seluruh peningkatan pendapatan desa, baik yang berkembang menurut adat istiadat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan tujuan dari pendirian BUMDes adalah sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan pedesaan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUMDes ini mempunyai sasaran yaitu terlayannya masyarakat desa dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

BUMDes menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes sebelumnya telah diamanatkan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai kerangka dasar otonomi daerah yang mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah *Bottom-up planning* dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Pendirian BUMDes adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, sustainable. Oleh karena itu perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional, dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. BUMDes yang merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dinyatakan dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 ayat (1) tentang desa, bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik desa yang di sebut BUMDes. Pendirian BUMDes harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi desa adalah sebagai berikut:

- a) Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok
- b) Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal
- c) Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat

d) Adanya unit-unit yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat.

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes.

Mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes. Namun saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu kabupaten yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Bogor, yang di amanatkan melalui Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tata

Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan Perda tersebut sangat diperlukan agar nantinya BUMDes yang sudah dibentuk dapat berkembang dan menjadi kuat sehingga dapat menopang perekonomian desa. Perda tersebut mengatur tentang tata cara pendirian BUMDes sehingga pemerintah desa yang akan membentuk BUMDes mempunyai payung hukum dan acuan dalam mendirikan BUMDes.

Jenis usaha BUMDes berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No 04 Tahun 2012 Pasal 12 Meliputi:

- a) Usaha Jasa, yaitu Jasa keuangan Mikro, Jasa keuangan Transportasi, Jasa keuangan Komonikasi, Jasa Keuangan Kostruksi dan Jasa keuangan energi.
- b) Usaha penyaluran Sembilan bahan pokok, yaitu Beras, Gula, Garam, Minyak goreng, Kacang kedelai dan Bahan pangan lainnya yang di kelola warung desa atau lumbung desa.
- c) Usaha perdagangan hasil Pertanian, yaitu Jagung, Buah-buahan dan Sayuran.
- d) Usaha industri kecil dan rumah tangga yaitu, Makanan, Minuman (Kerajinan Rakyat), Bahan bakar alternative dan Bahan bangunan.

Sejalan dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 04 Tahun 2012 Desa Bojonggede membentuk BUMDes Pada tahun 2015 dengan Landasan hukum Peraturan desa Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Pembentukan BUMDes di desa Bojonggede dengan nama "Bojonggede makmur" Pada awal pembentukannya Bergerak di bidang Jasa mikro (kopras), namun tidak perjalan dengan lancar karna berbagai kendala. BUMDes Bojonggede makmur saat ini bergerak di bidang jasa keuangan transportasi (Penyewaan alat berat).

Namun Dalam Pembentukan BUMDes menimbulkan masalah yang menyebabkan pelaksanaan BUMDes tidak berjalan dengan baik. Dari hasil proobservasi yang dilakukan peneliti di desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang di hadapi BUMDes Bojonggede makmur:

- a) Salah satu faktor yang paling dominan adalah lemahnya kelembagaan

sehingga menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan BUMDes.

- b) Sumber dana yang sangat minim. Minimnya dana yang di kelolah BUMdes bojonggede makmur menghambat kemajuan usaha yang di kelolahnya
- c) Pemberdayaan Masyarakat Lokal. Keberadaan BUMDes seharusnya menjadi lapangan kerja dan akses ekonomi untuk masyarakat di Desa Bojonggede. Namun ada sebagian masyarakat yang menilai jika BUMDesa belum memberdayakan masyarakat sekitar..

Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang BUMDes dengan mengambil Judul "**Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat**".

2. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Untuk memahami bagai mana strategi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di desa iwul kecamatan parung kabupaten bogor, dalam menyusun skripsi pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Kirk dan Millermendefinisikan bahwa tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor metodepenelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkandeskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yangdapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individutersebut secara *holistic* (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasiindividu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlumemandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Sedangkan yang dimaksud dengan deskriptif yaitu penelitian yang diusahakan untuk mengindra secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta yang ada. Penelitian dilakukan hanya untuk menerapkan suatu fakta melaluisajian-sajian data tanpa menguji hipotesis. Data yang dikumpulkan adalah berpakata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitianakan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporantersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan,foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmilainnya. Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya. Hal itu hendaknya dilakukan seperti orang merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Desa : Iwul
Kecamatan: Parung
Kabupaten : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Kode Pos : 16330.

Adapun jadwal penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Agustus tahun 2018 sampai bulan.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu hasil wawancara dengan responden.

Menurut Iqbal Hasan, data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain:

- a) Catatan hasil wawancara;
- b) Hasil observasi lapangan;
- c) Data–data mengenai informan.

Menurut Moleong informan adalah orang yang di dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana angkah yang di tempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya. Karena itu di dalam

pembahasan ini yang paling penting adalah ‘peneliti’ menentukan penelitian meliputi beberapa macam yaitu :

- a) Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok diperlukan dalam penelitian;
- b) Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti;
- c) Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, jumlah informan yang dibutuhkan sebanyak 9 (Sembilan) orang, di bagi dalam 3 (tiga) kategori yakni:

- a) Informan I adalah Perangkat Desa sebanyak 3 (tiga) orang;
- b) Informan II adalah Pengurus BUMDes sebanyak 3 (tiga) orang;
- c) Informan III adalah Masyarakat sebanyak 3 (orang) orang.

Sedangkan data sekunder adalah data yang di ambil secara tidak langsung dari sumbernya atau di peroleh dari studi pustaka dokumen atau hasil laporan karya tulis orang lain, surat kabar, majalah–majalah, jurnal–jurnal ilmiah, internet dan media lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secarasistematika terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Pengamatandan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atauberlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki dan disebut juga observasi langsung. Dimana penelitian ini dapat dilakukan dengan tes, rekaman gambar, dan sebagainya.

Observasi, dalam penelitian ini peneliti mengamati, merekam atau mencatat hasil-hasil dari Strategi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

b. Wawancara

Metode wawancara/interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait Strategi pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, undang-undang, surat kabar, majalah, catatan-catatan, transkrip, notulen rapat, agenda, internet dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang Strategi pengelolaan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan Asli desa.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, teknik analisa data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa dengan menggunakan model interaktif (*interactive models of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi.

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses peyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel).

b) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang ada secara sederhana, rinci, utuh, dan *integrative* yang digunakan sebagai pijakan untuk menentukan langkah berikutnya dalam menarik kesimpulan dari data yang ada.

Miles dan Huberman mengatakan pada tahap ini peneliti banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Penelitian kualitatif biasanya disokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu.

c) Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat *grounded* (dasar).

F. Keabsahan Data

Kualitatif sebagai salah satu metode penelitian memiliki standarisasi tersendiri dalam menentukan tingkat kepercayaan sebuah data yang ditentukan di lapangan.

dalam pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif menggunakan :

- a) **Derajat kepercayaan** (*credibility*), yaitu apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau dipercaya, untuk itu dapat dilakukan dua hal, pertama, melaksanakan inluri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.
- b) **Keteralihan** (*transferability*), yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. Yang dimana pada penelitian kualitatif, keteralihan sangat tergantung pada kesamaan antar kontek pengirim dan penerima. Untuk mewujudkan keteralihan tersebut, seorang peneliti harus berupaya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks tertentu.
- c) **Kebergantungan** (*dependability*), yaitu apakah hasil penelitian apakah mengacu pada konsistenan peneliti dalam mengumpulandata, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.
- d) **Kepastian** (*confirmability*), yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. dalam penelitian kualitatif penekanannya bukan pada orangnya melainkan pada data, sehingga ketergantungan itu pada datanya, bagaimana cirri-ciri datanya apakah dapat dipastikan atau tidak.

Triangulasi data pada hakikatnya merupakan pendekatan multimedia yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan data menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.

Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek

kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menurut Norman K. Denkin Triangulasi merupakan gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Triangulasi meliputi empat hal, yaitu: Triangulasi metode, Triangulasi antar peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), Triangulasi sumber data, dan Triangulasi teori.

Penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk membandingkan hasil wawancara dari sumber yang berbeda yang didapat dari informan yang dibutuhkan oleh peneliti. Tujuan melakukan perbandingan hasil wawancara tersebut adalah untuk melihat dan mendapatkan data yang spesifik dan jelas.

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, misalnya, melalui wawancara, observasi, dan observasi terlibat/dokumentasi (*participant observation*) berupa dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Dari berbagai sumber data tersebut peneliti dapat melakukan perbandingan untuk bisa memberikan hasil atau kesimpulan dari pada penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengoptimalan penyelenggara pemerintahan pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah desa perlu didukung oleh pembiayaan dari sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes) bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu pendapatan desa yang dapat ditingkatkan adalah pendapatan asli desa, yaitu berupa lembaga usaha desa. Lembaga usaha desa yang dimaksud adalah Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya

dsingkat BUMDesa adalah badan Menurut peraturan Menteri Desa, PDTT Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDesa juga sebagai wadah untuk mengoptimalkan potensi desa dengan mengangkat hasil industri masyarakat dengan ikut memberikan bantuan permodalan/pemasaran/pelatihan maupun pengembangan usaha. Sehingga masyarakat semakin mandiri dan mampu mengembangkan usahanya berasam BUMDesa. serta mampu mengembangkan potensi desa yang ada dengan kearifan lokal, sehingga semakin banyak tumbuhnya kegiatan usaha masyarakat bersama BUMDesa. Semakin berkembangnya usaha masyarakat semakin besar pula perkembangan BUMDesa serta semakin besar pula Pendapatan Asli Desa. BUMDesa Bojong Makmur Desa Bojonggede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat didirikan mempunyai maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dari didirikannya BUMDesa Bojonggede Makmur ini adalah untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program dan atau proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Deskripsi hasil dan analisis penelitian dimaksudkan untuk menyajikan data yang dimiliki sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dikaji pada penelitian yaitu strategi pengelolaan badan usaha milik desa (BUMdes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa,

1. Perencanaan Badan Usaha Milik Desa Bojonggede Makmur Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Tahun 2018

Perencanaan terjadi disemua tipe kegiatan. Perencanaan merupakan proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam organisasi adalah hal yang sangat penting, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Jadi pada dasarnya, semua organisasi profit ataupun nonprofit pasti melakukan kegiatan perencanaan dalam menghidupkan organisasinya, termasuk juga organisasi pemerintahan. Pemerintah Desa Bojonggede dengan kewenangan yang dimilikinya telah mendirikan suatu Badan Usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa Bojonggede bisa mandiri dan tidak berharap kepada dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Badan Usaha tersebut diberi nama BUMDes Bojonggede Makmur. Untuk mewujudkan tujuannya dalam meningkatkan pendapatan asli desa, suda barang tentu BUMdes bojonggede makmur harus di berdayakan karena merupakan suatu badan usaha yang proritas utamanya adalah menjalnlkan suatu usaha demi pemasukan atau keutungan yang sebesar-besarnya bagi desa bojonggede.

Untuk mencapai tujuan tersebut, di butuhkan sumber daya yang menjadi penopang jalanya BUMDes Bojonggede Makmur. Sumber daya tersebut adalah:

1. Sumber daya manusia
2. Sumber daya anggaran

Sumber daya mausia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Berdasarkan dari latar pendidikan, dapat di asumsikan bahwa sumber daya manusia yang mengelola BUMDes bojonggede makmur mampu untuk memajukan BUMDes ke arah yang lebih baik. Namun pada kenyataannya pada dokumen APB desa bojonggede pada tahun 2018, BUMDes Bojonggede Makmur tidak mendapatkan

alokasi anggaran untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber dana BUMDes bojonggede makmur berasal dari bantuan permodalan usaha bumdes yang di berikan oleh kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Berikut ini adalah rincianya;

Tabel Uraian kegiatan BUMDes

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH HARGA
1	Belanja kebutuhan bank smpa	Rp. 9.410.000
2	Belanja kebutuhan peralatan PPOB	Rp. 8.000.000
3	Usaha Fotocopy Center	
	a. Belanja kebutuhan peralatan fotocopy center	Rp. 29.700.000
	b. belanja kebutuhan perlengkapan fotocopy center	Rp. 2.890.000

Sumber: (realisasi penggunaan dana permodalan tahun 2018)

Menggapai data di atas, berikut ini adalah komentar dari direktur BUMDes bojonggede makmur mengenai tidak di anggarkannya anggaran untuk BUMDes bojonggede makmur dalam dokumen APD desa 2018:

“sampai sekarang belum ada dana desa yang kami terima dari pemerintahan desa pada tahun 2018”

Sebaliknya, kepala desa bojonggede mempunyai persepsi lain atas tidak di berikannya anggaran yang bersumber dari APBD desa 2018 kepada BUMDes bojonggede makmur: berikut ini adalah keterangan dari kepala desa:

“kita akui bahwa kepengurusan BUMDes bojonggede makmur belum maksimal, masih mengandalkan sistem politik praktis, masih melihat dari banyaknya kepentingan politik sehingga kami fokuskan dana desa buat pembangunan infrastruktur di desa bojonggede sehingga dana desa belum di alokasikan pada BUMDes..”

Sejalan dengan komentar sekretaris desa. Mengenai Dana yang di kelolah BUMDes:

“Untuk saat ini dana desa belum ada yang di alokasikan buat kegiatan BUMDes. Saat ini dana desa di fokuskan pada pembangunan infrastruktur semua”

Dari komentar kepala desa dan direktur BUMDes bojonggede makmur di atas dapat di asumsikan bahwa:

1. Ketidak puasan kepala desa atas kinerja pengelola BUMdes
2. Ketidak pedulian kepala desa akan keberlangsungan jalanya BUMDes bojonggede

Kedua asumsi di atas berkaitan erat dengan teori konflik yang di kemukakan oleh Stephen P. Robbins yang mendepenisikan:

“sebagai sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negative, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama.”

Apabila keterangan dari kepala desa dan direktur BUMdes dikaitkan dengan teori konflik yang di kemukakan oleh Stephen P. Robbins maka di dapat asumsi bahwa BUMdes bojonggede makmur dalam tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli desa terhambat karena adanya konflik antara kepala desa dan direktur bumdes yang berimbas kepada tidak di anggarkannya dana untuk BUMdes pada APB desa 2018, sehingga BUMdes bojonggede makmur terkesan jalan sendirian dalam menjalankan usahanya yang bersumber dari bantuan permodalan

dari kementerian PDPT sebesar RP.50.000.000.

Dalam menjalankan usahanya dalam kondisi keuangan yang terbatas berikut ini adalah keterangan daripada direktur BUMDes bojonggede makmur mengenai pelaksanaan strategi yang digunakan dalam mendapatkan keuntungan :

”adapun strategi yang kami gunakan dalam mengelolah fotocopy center yang perta kami mencari lokasi yang ramai di kunjungi orang, yang kedua kami buat promasi dengan cara membuat baliho,”

“strategi kami di bagian pelayanan PPOB kami sediakan produk yang lengkap, seperti token listrik, pembayaran BPJS, kartu kredit dan pembayaran asuansi”

“ strategi yang kami lakukan di bagian bank sampa adalah kami membeli sampah seperti sampah plastik kertas bekas kemudian kami jual kembali ke perusahaan yang membutuhkan”

Berdasarkan dari keterangan di atas hal tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Gerald Michaelson:

“strategi adalah suatu rencana yang akan diterapkan dengan melakukan berbagai hal yang tetap”

Apabilah keterangan tersebut di kaitkan dengan teori strategi maka dapat di tarik kesimpulan bahwa sebelum melaksanakan kegitanya BUMDes bojonggede telah menyusun rencana yang akan di terapkan dalam mengelolah usah BUMDes bojonggede makmur sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa bojonggede.

2. Pelaksanaan perencanaan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa tahun 2018

A. Pelaksanaan perencanaan BUMDes

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

sederhana pelaksanaan bias diartikan sebagai penerapan.

Sama halnya dengan BUMDes Bojonggede makmur, sebelum di laksanakan seatu kegiatan, kegiatan tersebut harus bredasarkan kepada dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan dalam hal ini adalah bantuan permodalan usaha BUMDes dari kemendes PDPT.

Adapun kegiatan yang di jalalankan oleh BUMdes bojonggede pada tahunn 2018 adalah sebagai berikut :

a) Fotocopy center

Semakin maraknya usaha bisnis di kalangan masyarakat, salah satu yang berkembang pesat adalah usaha bisnis bidang jasa yaitu fotocopy. Meninggi dan meningkatnya jumlah bisnis bidang jasa fotocopy akan meningkatkan persaingan. Untuk menghadapi persaingan yang semakin meningkat tersebut, bisnis bidang jasa fotocopy perlu membuat, menyusun, dan menetapkan strategi-strategi yang tepat dengan tujuan untuk memenangkan persaingan, meraih laba, dan melanjutkan kegiatan usaha atau bisnis tersebut. Dengan demikian BUMDes bojonggede makmur memilih usha fotocopy center sebagai salah satu kegiatan di kelolah dengan tujuan untuk meningkatkan pedapatan asli desa di desa bojonggede.

Berikut ini adalah keterangan dari direktur BUMDes mengenai pelaksanaan strategi sebagi mana yang tercantum dalam dokumen perencanaan :

“Kami menempatkan fotocopy center di kantor BUMDes karena letak kantor BUMDes berseblahan dengan kantor desa jadi orang yang mengurus berkas bias fotocopy disini,kemudian kegiatan yang kami lakukan mebuat baloho agar masyrakat tahu akan keberadaan fotocopy center. Adapun “

b) Loket PPOB (Payment Point Online Bank) Payment Point Online Bank (PPOB) merupakan suatu layanan yang

menyediakan jasa pembayaran multi payment dimana pengguna jasa layanan tersebut bias melakukan berbagai pembayaran diantaranya adalah listrik PLN, Speedy, pulsa elektrik, dan lain-lain. Listrik dan pulsa elektrik sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi masyarakat,

Aplikasi Payment Point Online Bank (PPOB) berbasis mobile (untuk pelanggan) digunakan agar pelanggan bisa melakukan pembayaran listrik, pembelian pulsa token listrik Prabayar, dan pulsa elektrik. Pada aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur diantaranya adalah:

- 1) Fitur deposit agar pengguna bisa menambah deposit. Layanan yang disediakan untuk deposit ada 2 cara yang pertama adalah deposit Cash On Delivery (COD). Sehingga operator loket Payment Point Online Bank (PPOB) datang langsung untuk mengambil uang untuk deposit dari pelanggan. Kemudian deposit melalui transfer bank.
- 2) Transaksi Pembayaran listrik, pembelian pulsa token listrik Prabayar, dan pembelian pulsa elektrik.
- 3) Fitur inbox yang berisi tentang notifikasi dari operator loket Payment Point Online Bank (PPOB) berupa informasi transaksi dan layanan.
- 4) Untuk membantu pelanggan melihat data-data transaksi aplikasi juga menyediakan fitur transaksi dimana pelanggan bisa melihat record dari transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan.
- 5) Mengirim pesan ke operator loket Payment Point Online Bank (PPOB) sehingga pengguna bisa mengirim pesan saran atau komplain kepada operator dengan menggunakan fitur tersebut.
- 6) Transfer saldo pada sesama pengguna aplikasi.
- 7) Adanya pemberitahuan melalui pesan singkat dari setiap transaksi.

- 8) Aplikasi menyediakan menu pembayaran otomatis

Pada dasarnya PPOB merupakan salah satu usaha yang dapat memberikan keuntungan baik masyarakat terlebih di kalangan pengelola jika dapat di kelola dengan baik. adapun komentar Direktur BUMDes mengenai pelaksanaan rencana usaha PPOB di BUMDes Bojonggede Makmur adalah :

“mengenai loket PPOB kami dan perangkat desa melakukan promosi kepada setiap warga yang datang di kantor desa”

- c) Bank sampah

Program bank sampah merupakan suatu sistem pengolahan sampah secara kolektif dengan prinsip daur ulang. Sementara masyarakat juga yang bertindak sebagai nasabah bank sampah akan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian bank sampah juga akan berdampak positif bagi lingkungan dan dapat memperbaiki kondisi ekonomi bagi suatu komunitas.

BUMDes Bojonggede Makmur mencoba mengurangi dampak sampah yang ada di lingkungan desa Bojonggede melalui pengelolaan bank sampah. Namun pelaksanaan bank sampah belum berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Di karenakan masyarakat Bojonggede masih memandang sampah sebagai suatu yang tidak berharga atau tidak punya nilai. Sehingga masyarakat kurang merespon program pelaksanaan bank sampah tersebut.

Berikut adalah komentar dari Direktur BUMDes Bojonggede mengenai pelaksanaan Bank sampah:

“untuk pelaksanaan bank sampah pelaksanaannya tidak berjalan karena kurangnya antusias dari warga akan program ini sehingga menyulitkan pengembangan bank sampa”.

Berdasarkan komentar di atas jika di kaitkan dengan teori pelaksanaan yang di kemukakan oleh The Liang Gie :

“pelaksanaan adalah Usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktunya dimulai dan berakhir, dan bagaimana cara dilaksanakan”

Apabila keterangan tersebut dikaitkan dengan teori pelaksanaan dari The Liang Gie maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilaksanakan BUMDes bojonggede mandiri tidak berjalan dengan maksimal. Karena dari 3 (tiga) kegiatan yang di anggarkan hanya ada dua yang berjalan, Sedangkan satu program kegiatan lagi di anggap tidak berhasil.

B. Hasil Pelaksanaan kegiatan BUMDes

implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Rangkaian implementasi dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Namun implemementasi pelaksanaan BUMDes bojonggede tidak berjalan dengan lancar, singga hasil yang didapatkan dalam pelaksanaan kegiatan program BUMDes pada tahun 2018 tidak sesuai dengan yang di harapkan dan belum berdampak pada peningkatan pendapatata asli desa (PAD).

Adapun komentar Kepala desa bojonggede mengenai hasil dari kegiatan BUMDes bojonggede makmur :

“hasil BUMDes bojonggede saat ini masi tahap penyesuaian hanya cukup buat gaji karyawanya saja, masi belum ada masuk dalam kas desa atau belum biasa meningkatkan PADes.”

Sejalan dengan komentar sekertaris desa bojonggede:

“belum ada pendapatan atau hasil dari BUMDes bojonggede makmur yang masuk di kas desa”

Sejalan dengan komentar direktur BUMDes:

“Bulum ada mas, karna memang PAD bias masuk jika ada penyertaan modal dari dana desa itu intinya mas. Sementara ini usaha yang berjalan baru sekedar operasional dan menggaji karyawan baru itu saja. Ya kalau di pembukuan kita mas sebenarnya mines karena operasionalnya tingga sementara hasilnya tidak seimbang makanya selalu di tambahkan dari kantong pribadi mas”

Sedangkan komentar Muh. Ariansya selaku masyarakat adalah:

“kalau masalah hasinya saya tidak tau mas, karena belum ada saya dengar peranggung jawabn terkait BUMDes ini. Dan yang saya tau PAD desa kami belum ada dari BUMDes mas”

Sejalan dengan komentar Ibu Hermiati dahlan: *“Setau saya tidak ada mas, karna kegiatan BUMDes saja saya tidak tau apa mas”*

Berdasarkan komentar di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil dari pelaksanaan BUMDes bujonggede makmur belum dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) bojonggede

3. Kendala BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli Hasil desa tahun 2018

Faktor penghambat dalam organisasi merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam setiap organisasi maupun perusahaan. Kelemahan menjadi faktor yang dapat memepengaruhi berhasil atau tidaknya suatu program kegiatan yang sedang dilaksanakan. Kelemahan juga menjadi titik terendah yang harus dilaksanakan untuk membangkitkan semangat dalam ranah pembangunan. Dalam organisasi atau perusahaan, tentu

memiliki hambatan atau titik terendah pada pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan BUMDes Bojonggede makmur muncul seiring perkembangan pelaksanaan kegiatan BUMDes, hambatan yang paling menonjol pada pelaksanaan BUMDes bojonggede adalah minimnya keuangan atau dana yang di kelolah oleh BUMDes bojonggede sehingga menghambat perkembangan pengelolaan BUMDes bojonggede makmur.

a) Kurangnya sumber dana

Kurangnya sumber dana yang di terima oleh BUMdes bojonggede sehingga menghambat kegiatan yang telah di rencanakan pengelolah BUMDes bojonggede. Adapun komentar direktur BUMdes bojonggede makmur adalah:

“Kami belum mendapatkan alokasi dana dari pemerintah desa sehingga kami belum bias menjalankan rencana kegiatan yang kami rencanakan sebelumnya, dana yang kami kelolah saat ini haya bersumber dari bantuan Kemendes PDDT”

Sejalan dengan komentar kepala desa bojonggede:

“saat ini kami belum bias memberikan alokasi dana desa buat pengembangan BUMDes, kami fokus pada pembangun infrastruktur”

Berdasarkan komenter di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa salah satu penghambat pelaksanaan program BUMdes bojonggede adalah minimnya dana yang di kelolah.

b) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat

Salah satu kendala dalam pengolaan BUMDes adlah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga kegiatan yang terkait dengan dilaksanakan oleh BUMDes masyarakat kurang antusias dan bahkan ada yang belum tau mengenia kegiatan bumdes.

Berikut ini adalah komentar Muh. Ariansya selaku masyarakat di desa bojonggede :

“setau saya mas, sosialisasi mengenai BUMDes masi sangat kurang, saya baru tau program BUMDes bojonggede setelah saya datang di kantor desa mas karena ada baloho yang di pasang di depan kantor bumdes. Dan saya yakin banyak masyarakat yang lain belum mengatahui program bumdes di desa ini mas”

Sejalan dengan komentar Ibu Herniati Dahlan:

“Saya tidak pernah mendengar mengenai sosialisasi mengenai BUMDes bojonggede makmur mas”

Berdasarkan komentar di atas dapat penelital menyimpulkan bahwa BUMdes bojonggede sangat kurang dalam mengadakan sosialisasi kepa masyarakat

4. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berasarkan penelitian yang telah di lakukan mengenai stretegi pengelolaan bada usaha milik desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi BUMDes Bojonggede Makmur mendirikan usaha di bidang fotocopy center, Loker PPOB dan Bank sampah.
2. Pelaksanaan Strategi yang di laksanakan BUMDes bojonggede makmur tidak berjalan dengan baik sehingga belum ada penambahan pendapatan asli desa yang bersumber dari BUMDes bojonggede makmur.
3. Kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh BUMDes bojonggede sehingga masnyrakat kurang memahami kegiatan yang di laksanakan oleh BUMDes bojonggede sehingga antusias masyarakat terhadap kegiatan BUMDes Bojonggede makmur sangat kurang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, agar strategi pengelaan BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Manajemen BUMDes bojonggede makmur sebaiknya menyusun strategi yang lebih baik dan menentukan usaha yang lebih bisa menghasilkan seperti pengelolaan pasar desa dan sebagainya.
2. Pemerintah Desa bojonggede sebaiknya mengalokasikan sebagian dana Desa untuk pengembangan BUMDes bojonggede makmur sehingga pelaksanaan Program BUMDes Bojonggede Makmur berjalan dengan baik. sehingga BUMDes dapat berperan dalam menemba pendapatan asli desa seperti yang di harapkan BUMDes bojonggede makmur sebaiknya mengadakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat Desa bojonggede agar masyarakat dapat memahami banyaknya manfaat yang akan diperoleh dari pengembangan program BUMDes bojonggede makmur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adisasmita . Rahardjo, *pengelolaan pendapatan dan belanja dan anggaran daerah* Yogyakarta: Graha ilmu, 2011
- Arifin Anwar, *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armilo, 1984
- Arikunto. Suharsimi, *pengelolaan kelas dan siswa*, jakarta : CV. Rajawali, 1988
- , Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta; bina aksara 1989
- , Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta 2002
- Bungin. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Daryanto, *kamus indonesia lengkap*, Surabaya : Apollo, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1989
- Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, 2009
- Geral A. Michaelson dan Steven W. Michaelson, *Strategi Usaha Penjualan*, Batam: Karisma Publishing Group, 2004
- Hari Purnomo. Setiawan, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996
- Laksmi Dewi dan Masitoh, *Strategi Pembelajaran*, Jakarta: DEPAG RI, 2009
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Moeleong. Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1997
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Riyanto. Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Surabaya, UnesaUniversity Press, 2007
- Siagian. Sondong P, *Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- , *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D* Bandung: Alfabeta, CV, 2012
- , *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2007
- Suparyogo. Imam, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001
- Widjaja. H.A.W, *Otonomi Desa*, Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2015 Tentang susunan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan usaha milik Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa

Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

peraturan Bupati Bogor Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Tata cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha milik Desa

C. Skripsi

Ferdianto,Benny. 2006. *eksistensi badan usaha milik desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa di tiyuh candra kencana kecamatan tulang bawang tengah kabupaten tulang bawang barat*. Universitas Lampung.

Kurniawan. Ade. Eka. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa (Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Tahun 2015)".Universitas maritim raja ali haji.

Ferdianto,Benny. 2006. Eksistensi badan usaha milik desa terhadap Peningkatan pendapat anasli desa (tiyuh candra kencana kecamatan tulang bawang tengah kabupaten tulang bawan barat). Universitas Lampung

D. Internet

<http://studimanajemen.blogspot.com/2012/08/fungsi-manajemen-menurut-george-terry.html> (diakses 13 agustus 2019)

<http://digilib.unila.ac.id/10924/12/BAB%20II.pdf> (di akses 15 agustus 2018)

<http://digilib.unila.ac.id/28019/2/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

(diakses 18 agustus 2018).

